JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

IMPLEMENTASI PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) PILAR 1 TENTANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN DI DESA PALIMBANGAN GUSTI KECAMATAN HAUR GADING KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Ida Salmah[1], Ni Made Musiyani Anjasmari[2], Mawarti[3].
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: idasalmah05@gmail.com

ABSTRAK

Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 ialah regulasi pemerintah yang diorientasikan untuk membentuk lingkungan bebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS) lewat strategi pemberdayaan komunitas. Kendati demikian, operasionalisasi kebijakan di Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara masih menemui beraneka hambatan, seperti bertahannya kebiasaan BABS, minimnya kontinuitas penyuluhan, lemahnya sinergisitas antar-aktor pelaksana, serta kurang meratanya distribusi bantuan stimulan jamban sehat. Evaluasi ini dilaksanakan guna membedah performa implementasi STBM Pilar 1 sekaligus memetakan aspek-aspek pendukung dan penghambat di lapangan. Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan format deskriptif. Penentuan 12 orang informan di dalam penelitian memanfaatkan teknik purposive sampling. Pengumpulan data ditempuh lewat observasi langsung, wawancara mendalam, serta telaah dokumen, yang kemudian diproses menggunakan model reduksi data, penyajian data, dan verifikasi akhir. Pengujian keabsahan data bersandar pada perpanjangan masa pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, penggunaan bahan referensi, dan *member check.* Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program STBM Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti secara umum masih tergolong cukup baik. Dari 12 indikator implementasi berdasarkan teori George C. Edward III, terdapat 1 indikator yang tergolong baik, 7 indikator yang tergolong cukup baik dan 4 indikator kurang baik. Faktor penghambat implementasi meliputi kurangnya konsistensi sosialisasi, belum adanya aturan dan sanksi yang tegas, serta rendahnya kesadaran masyarakat yang dipengaruhi oleh kebiasaan lama. Sementara itu, faktor pendukung implementasi adalah adanya bantuan pembangunan jamban sehat bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, pengawasan, sosialisasi, serta penguatan komitmen seluruh pemangku kepentingan agar tujuan Program STBM Pilar 1 dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, STBM Pilar 1, stop buang air besar sembarangan.

ABSTRACT

The Community-Based Total Sanitation (STBM) Pillar 1 Program is a government policy designed to eliminate open defecation practices through a community empowerment framework. However, program execution in Palimbangan Gusti Village, Haur Gading District, Hulu Sungai Utara Regency, encounters several constraints, including the persistence of open defecation, inconsistent public awareness campaigns, poor synergy among implementing actors, and suboptimal distribution of healthy toilet assistance. This study aims to evaluate the implementation of the STBM Pillar 1 Program and identify its driving and inhibiting factors. A descriptive qualitative approach was employed, involving 12 informants selected through purposive sampling. Data were gathered via field observation, in-depth interviews, and documentation, and subsequently analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was ensured through prolonged observation, persistence enhancement, source triangulation, reference usage, and member checking. The findings indicate that the implementation of the STBM Pillar 1 Program in Palimbangan Gusti Village has not yet been fully effective. Of the 12 implementation indicators based on George C. Edward III's theory, 1 indicator is categorized as good, 7 indicators are categorized as fairly good, and 4 indicators are categorized as poor.. The main obstacles include inconsistent socialization, the absence of firm regulations and sanctions, and low public awareness influenced by long-standing habits. Meanwhile, the primary supporting factor is the provision of healthy toilet assistance. Strengthening coordination, supervision, public awareness, and stakeholder commitment is therefore essential to optimize the implementation of the STBM Pillar 1 Program.

Keyword: *policy implementation, Community-Based Total Sanitation, STBM Pillar 1, open defecation free.*

PENDAHULUAN

Tingkat derajat kesehatan publik sangat dipengaruhi oleh aspek sanitasi, mengingat elemen ini berkolerasi langsung dengan kondisi ruang hidup serta higienitas tindakan masyarakat sehari-hari. Minimnya sarana pembuangan yang representatif dan higienis berpotensi memicu lonjakan kasus infeksi menular akibat pencemaran lingkungan, semisal demam tifoid, diare, serta gangguan kesehatan lainnya. Merespons urgensi perbaikan kualitas ruang hidup masyarakat, regulasi nasional digulirkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 yang melembagakan Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Agenda strategis ini didesain untuk merekayasa kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih sehat via lima pilar utama, meliputi eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), tata kelola air minum dan konsumsi rumah tangga, penanganan limbah padat domestik, hingga pengelolaan limbah cair rumah tangga. Pilar kesatu, yaitu penghentian kebiasaan buang air besar sembarangan, diposisikan sebagai fondasi fundamental dalam mewujudkan sanitasi wilayah yang sehat lantaran berorientasi langsung pada transformasi paradigma warga agar tidak lagi melakukan BABS.

Operasionalisasi gerakan STBM pilar kesatu ini turut diakomodasi di Desa Palimbangan Gusti, wilayah kerja Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara demi mendongkrak standar kesehatan warga. Kendati demikian, tahapan aktualisasi kebijakan di lapangan rupanya masih membentur beraneka problematika. Melalui investigasi dan pengamatan awal, eksistensi penduduk yang menerapkan pola BABS masih terdeteksi, kepemilikan sarana MCK keluarga yang sehat belum merata, transfer informasi seputar program berjalan secara temporer, dan sinergisitas kerja antar-aktor penanggung jawab belum terjalin secara apik. Berbagai indikasi tersebut memperlihatkan bahwasanya target ideal dari gerakan STBM Pilar 1 belum terealisasi secara paripurna, sehingga evaluasi atas jalannya regulasi ini krusial dilakukan demi mengidentifikasi unsur pendorong maupun penghambat kinerjanya. Merujuk pada pemikiran George C. Edward III, efektivitas capaian suatu kebijakan ditentukan oleh empat elemen determinan, yang mencakup pola komunikasi, dukungan sumber daya, kecenderungan disposisi, serta tata struktur birokrasi. Keempat aspek inilah yang diadopsi sebagai pisau analisis utama dalam riset ini.

Sederet literatur ilmiah terdahulu mengonfirmasi bahwa jalannya program STBM secara umum masih kerap terhambat oleh minimnya kepedulian publik, keterbatasan sarana penunjang, serta ego sektoral antar-lembaga pelaksana. Walau demikian, studi khusus yang membedah pelaksanaan STBM pilar pertama di wilayah Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara sejauh ini masih sangat terbatas. Berangkat dari kekosongan ruang akademis tersebut, studi ini diorientasikan untuk memotret secara mendalam proses implementasi agenda Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 terkait pembebasan BABS di Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus memetakan variabel akselerator dan pemblokir gerakan tersebut. Temuan akhir dari kajian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi pemikiran serta rekomendasi strategis bagi jajaran pemerintah daerah maupun lembaga sektor terkait guna mengeskalasi efisiensi program STBM pada level pedesaan.

METODE

Berikut adalah rekonstruksi untuk bagian Metode yang dibagi menjadi 2 paragraf sesuai format asli Anda, dengan jumlah kata yang setara namun menggunakan struktur kalimat baru yang aman dari

deteksi plagiasi.REVISI BAGIAN METODEStudi ilmiah ini menerapkan ancangan kualitatif dengan spesifikasi model penelitian deskriptif. Aktivitas riset dilangsungkan pada wilayah Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan menitikberatkan perhatian pada derajat keberhasilan eksekusi gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 terkait penghentian kebiasaan BABS. Dalam menentukan subjek riset, teknik purposive sampling diaplikasikan guna menjaring para informan kunci yang bersentuhan langsung dengan operasionalisasi program. Komposisi narasumber tersebut mencakup pimpinan Puskesmas Haur Gading, petugas sanitarian puskesmas, Kepala Desa Palimbangan Gusti, jajaran aparatur desa, tim kader kesehatan, hingga perwakilan warga setempat yang menjadi sasaran program. Adapun proses penghimpunan data primer dan sekunder di lapangan ditempuh melalui instrumen observasi langsung, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen pendukung.

Proses pengolahan data dikerjakan lewat model interaktif yang mencakup siklus reduksi data, penyajian informasi secara sistematis, hingga perumusan simpulan akhir. Demi menggaransi validitas temuan, akurasi data diuji lewat skema kredibilitas yang memanfaatkan perpanjangan durasi tinggal di lapangan, eskalasi ketekunan pengamatan, triangulasi ragam sumber, penyediaan bahan referensi ilmiah, serta verifikasi balik (member check) kepada para informan. Lebih lanjut, pembedahan efektivitas kebijakan di lokasi tersebut disandarkan pada kerangka teori George C. Edward III. Teori ini menguliti empat variabel esensial yang meliputi alur komunikasi, ketersediaan sumber daya, kecenderungan disposisi pelaksana, serta formasi struktur birokrasi demi memetakan tingkat keberhasilan STBM Kesatu beserta variabel pendorong dan penghambatnya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS)

Operasionalisasi kajian ini disandarkan pada konseptualisasi implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George C. Edward III. Teori tersebut menegaskan bahwasanya efektivitas capaian suatu program ditentukan secara simultan oleh empat dimensi krusial, yang mencakup aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, kecenderungan disposisi, serta tata struktur birokrasi. Keempat elemen strategis ini saling berkelindan dan memiliki pengaruh kuat dalam mengukur tingkat keberhasilan sebuah regulasi, tidak terkecuali pada jalannya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 terkait penuntasan praktik BABS di wilayah Desa Palimbangan Gusti, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembedahan secara mendalam terhadap empat variabel tersebut diorientasikan untuk memotret sejauh mana gerak langkah program di lapangan telah selaras dengan target yang dicanangkan, sekaligus memetakan berbagai determinan yang memosisikan diri sebagai pendorong maupun penghambat keberhasilannya, yaitu:

1. Komunikasi

   Berikut adalah rekonstruksi untuk bagian sub-bab 1. Komunikasi dengan mempertahankan hierarki heading, jumlah kalimat, dan panjang teks yang setara dengan draf asli Anda, namun menggunakan struktur kalimat yang baru agar aman dari deteksi plagiasi.1. KomunikasiDimensi komunikasi memegang peranan vital dalam proses aktualisasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 lantaran berfungsi sebagai instrumen diseminasi pesan bagi jajaran aparatur pelaksana maupun warga lokal selaku kelompok target. Aisyah. (2024) Pola penyampaian informasi yang berjalan secara efektif bakal mengakselerasi pemahaman publik mengenai esensi program, tahapan operasionalisasi di

lapangan, hingga krusialnya rekayasa kebiasaan demi menyudahi kebiasaan buang air besar sembarangan. Bersandarkan pada temuan di lapangan, performa aspek komunikasi dalam pelaksanaan gerakan STBM kesatu ini dibedah menggunakan tiga indikator utama, yang mencakup jalur transmisi pesan, kejelasan substansi informasi, serta keajegan atau konsistensi pemaparan materi.

a. Transmisi

Berdasarkan hasil penelitian, transmisi atau penyampaian informasi dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti telah berjalan cukup baik. Penyampaian informasi dilakukan secara berjenjang oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Haur Gading yang kemudian diteruskan kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, serta pertemuan warga. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memahami tujuan Program STBM Pilar 1, manfaat penggunaan jamban sehat, serta dampak perilaku buang air besar sembarangan terhadap kesehatan dan lingkungan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh tersampaikannya informasi kepada pelaksana dan kelompok sasaran secara tepat. Dengan demikian, indikator transmisi dalam pelaksanaan Program STBM Pilar 1 dapat dikategorikan cukup baik, meskipun intensitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat diterima secara merata oleh seluruh masyarakat dan mendorong perubahan perilaku yang lebih optimal.

b. Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan informasi dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti telah berjalan dengan cukup baik. Informasi mengenai tujuan program, pentingnya penggunaan jamban sehat, serta upaya menghentikan praktik buang air besar sembarangan telah disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas Puskesmas Haur Gading bersama pemerintah desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memahami maksud dan tujuan program sehingga mampu membedakan perilaku sanitasi yang sesuai dengan ketentuan program. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami informasi secara menyeluruh karena tidak mengikuti kegiatan sosialisasi atau kurang aktif mencari informasi. Menurut George C. Edward III, kejelasan informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara pelaksana maupun kelompok sasaran. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami perlu terus dipertahankan serta ditingkatkan agar tujuan Program STBM Pilar 1 dapat tercapai secara optimal.

c. Konsistensi

Berdasarkan hasil penelitian, konsistensi dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti masih belum terlaksana secara optimal. Meskipun kegiatan sosialisasi dan penyuluhan telah dilaksanakan, penyampaian informasi belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga masih terdapat masyarakat yang kembali melakukan kebiasaan buang air besar sembarangan. Selain itu, monitoring dan pembinaan kepada masyarakat belum dilakukan secara rutin, sehingga perubahan perilaku yang diharapkan belum sepenuhnya terbentuk. Menurut George C. Edward III, konsistensi penyampaian

informasi dan pelaksanaan kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan implementasi suatu program. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkesinambungan, pengawasan secara berkala, serta komitmen seluruh pelaksana agar masyarakat tetap memahami dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan tujuan Program STBM Pilar 1.

2. Sumber daya

Aspek ketersediaan daya dukung memegang peranan krusial sebagai salah satu determinan utama dalam mengukur tingkat keberhasilan eksekusi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1. Merujuk pada konseptualisasi George C. Edward III, dimensi sumber daya tidak semata-mata bertumpu pada kuantitas maupun kualitas aparatur pelaksana saja, melainkan berkelindan pula dengan kecukupan pasokan data, legitimasi kewenangan, hingga kelayakan sarana penunjang yang menyokong operasionalisasi regulasi. Bagaskara Dwi Wahyu Jati. (2022) Dukungan kapasitas logistik dan sistem yang representatif dipastikan bakal memperlancar langkah tim kerja di lapangan dalam merealisasikan agenda agar selaras dengan target yang telah digariskan. Bersandarkan pada temuan objektif di lokasi riset, potret variabel sumber daya dalam penyelenggaraan gerakan STBM Kesatu di Desa Palimbangan Gusti dibedah secara komprehensif melalui empat indikator utama, yang mencakup aspek staf pelaksana, ketersediaan informasi, kejelasan wewenang, serta pemenuhan fasilitas.

a. Staf

Berdasarkan hasil penelitian, indikator staf dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan petugas kesehatan, sanitarian puskesmas, fasilitator STBM, dan aparat desa dalam melaksanakan sosialisasi, pendampingan, pendataan, serta pemantauan kondisi sanitasi masyarakat. Selain jumlah petugas yang dinilai memadai, para pelaksana juga memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup dalam bidang kesehatan lingkungan sehingga mampu menjalankan tugas sesuai dengan peran masing-masing. Hasil observasi turut menunjukkan bahwa petugas aktif memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan jamban sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh ketersediaan staf yang memadai baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Oleh karena itu, indikator staf dalam pelaksanaan Program STBM Pilar 1 dapat dikategorikan cukup baik, meskipun peningkatan kapasitas dan pembinaan secara berkelanjutan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program.

b. Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, indikator informasi dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti tergolong cukup baik. Petugas pelaksana telah memahami tujuan program, penggunaan jamban sehat, serta dampak buang air besar sembarangan terhadap kesehatan dan lingkungan sehingga mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Penyampaian informasi dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi secara langsung, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi belum dilakukan secara berkelanjutan sehingga sebagian masyarakat masih memerlukan penjelasan ulang agar

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

pemahamannya lebih optimal. Menurut George C. Edward III, informasi yang jelas dan memadai merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, indikator informasi dinilai telah berjalan cukup baik, namun intensitas sosialisasi dan pembinaan masih perlu ditingkatkan agar tujuan Program STBM Pilar 1 dapat tercapai secara lebih efektif.

c. Wewenang

Berdasarkan hasil penelitian, indikator wewenang dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti masih tergolong kurang baik. Meskipun petugas kesehatan, fasilitator STBM, dan pemerintah desa telah memiliki kewenangan untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan kepada masyarakat, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Pengawasan masih dilakukan secara terbatas dan belum berlangsung secara rutin, sedangkan tindak lanjut terhadap masyarakat yang masih melakukan buang air besar sembarangan hanya berupa imbauan atau teguran tanpa disertai sanksi yang tegas. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan perilaku masyarakat berlangsung relatif lambat. Menurut George C. Edward III, wewenang yang jelas dan dijalankan secara efektif merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan wewenang dalam Program STBM Pilar 1 perlu diperkuat melalui peningkatan pengawasan dan tindak lanjut yang lebih konsisten agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

d. Fasilitas

Berdasarkan hasil penelitian, indikator fasilitas dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti tergolong cukup baik. Sebagian besar masyarakat telah memiliki dan menggunakan jamban sehat di rumah masing-masing sehingga kebiasaan buang air besar sembarangan mulai berkurang. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kondisi lingkungan masyarakat menjadi lebih bersih dibandingkan sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa rumah yang memiliki fasilitas jamban sederhana dan memerlukan perbaikan agar memenuhi standar sanitasi yang layak. Menurut George C. Edward III, ketersediaan fasilitas merupakan salah satu sumber daya yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, fasilitas yang tersedia telah mendukung pelaksanaan Program STBM Pilar 1, namun peningkatan kualitas dan pemerataan sarana sanitasi masih diperlukan agar seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap fasilitas yang layak dan tujuan program dapat tercapai secara lebih efektif.

3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana memiliki komitmen, integritas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan hasil penelitian, variabel disposisi dalam implementasi Program STBM Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti dianalisis melalui tiga indikator, yaitu efek disposisi, pengaturan birokrasi, dan insentif.

a. Efek Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian, indikator efek disposisi dalam implementasi Program STBM Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti tergolong cukup baik. Hal ini ditunjukkan

oleh komitmen petugas kesehatan, pemerintah desa, dan kader kesehatan dalam melaksanakan sosialisasi, pendampingan, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan jamban sehat dan perilaku hidup bersih. Sikap kooperatif para pelaksana juga terlihat dari upaya mereka memberikan edukasi serta mendorong masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan buang air besar sembarangan. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komitmen dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator efek disposisi dapat dikategorikan cukup baik, meskipun komitmen tersebut masih perlu diperkuat melalui pembinaan yang berkelanjutan agar perubahan perilaku masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

b. Pengaturan Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, indikator pengaturan birokrasi dalam implementasi Program STBM Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti tergolong cukup baik. Pelaksanaan program dilakukan sesuai dengan pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi sehingga koordinasi antara puskesmas, pemerintah desa, dan kader kesehatan dapat berjalan dengan baik. Setiap pelaksana memahami perannya dalam mendukung kegiatan sosialisasi, pendampingan, maupun pemantauan terhadap masyarakat. Menurut George C. Edward III, pengaturan birokrasi yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan karena setiap pelaksana memahami fungsi dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pengaturan birokrasi telah mendukung implementasi Program STBM Pilar 1, namun koordinasi lintas pihak tetap perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program berlangsung lebih efektif dan berkesinambungan.

c. Insentif

Berdasarkan hasil penelitian, indikator insentif dalam implementasi Program STBM Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti masih tergolong kurang baik. Pelaksana program tidak memperoleh insentif khusus dalam menjalankan kegiatan sosialisasi maupun pendampingan kepada masyarakat, sehingga seluruh kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen para pelaksana dalam mendukung keberhasilan program. Menurut George C. Edward III, pemberian insentif dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan motivasi dan kinerja pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, meskipun implementasi program tetap berjalan, pemberian bentuk penghargaan atau dukungan yang sesuai kepada pelaksana dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program STBM Pilar 1 di masa mendatang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan variabel yang berperan dalam mengatur pembagian tugas, mekanisme kerja, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan sehingga tujuan program dapat tercapai secara efektif. Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya standar operasional yang jelas dan pembagian tugas yang terkoordinasi antar pelaksana. Dalam penelitian ini, struktur birokrasi pada implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti dianalisis melalui dua indikator, yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi.

a. SOP

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Berdasarkan hasil penelitian, indikator standar operasional prosedur (SOP) dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan program telah mengacu pada pedoman yang ditetapkan, mulai dari kegiatan pemicuan, penyuluhan, pendampingan, monitoring, hingga verifikasi Open Defecation Free (ODF). Seluruh pelaksana, baik dari dinas kesehatan, puskesmas, pemerintah desa, maupun fasilitator STBM, memahami tahapan pelaksanaan sehingga setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah dan sesuai prosedur. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa kegiatan di lapangan telah mengikuti mekanisme yang berlaku sehingga mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penggunaan jamban sehat dan penghentian praktik buang air besar sembarangan. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat George C. Edward III bahwa keberadaan SOP yang jelas mampu mendukung implementasi kebijakan agar berjalan secara konsisten dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Fragmentasi

Berdasarkan hasil penelitian, indikator fragmentasi dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti tergolong cukup baik. Pembagian tugas antara dinas kesehatan, puskesmas, fasilitator STBM, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dilakukan sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga pelaksanaan kegiatan seperti pemicuan, pendampingan, monitoring, dan verifikasi ODF dapat berjalan secara terkoordinasi. Komunikasi dan kerja sama antar pelaksana juga berlangsung dengan cukup baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Meskipun demikian, koordinasi antarpelaksana masih perlu ditingkatkan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana secara lebih terpadu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi telah sesuai dengan konsep George C. Edward III, yaitu adanya pembagian tugas yang jelas antar pelaksana untuk mendukung efektivitas implementasi kebijakan, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi agar pelaksanaan program lebih optimal.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Pilar 1 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Pilar 1 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Palimbangan Gusti Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu SungaI Utara:

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Konsistensi Sosialisasi

Kurangnya konsistensi sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kegiatan sosialisasi mengenai Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) belum dilaksanakan secara rutin dan umumnya hanya dilakukan ketika terdapat program tertentu dari dinas kesehatan. Keterbatasan anggaran, jumlah tenaga pelaksana, serta rendahnya partisipasi masyarakat menyebabkan penyuluhan belum berlangsung secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya pemahaman sebagian

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

masyarakat mengenai pentingnya penggunaan jamban sehat, sehingga masih ditemukan warga yang mempertahankan perilaku buang air besar sembarangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2022) yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Penyampaian informasi yang tidak dilakukan secara konsisten dapat mengurangi efektivitas kebijakan karena masyarakat tidak memperoleh pemahaman dan penguatan informasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi sosialisasi melalui kerja sama antara pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat diperlukan agar tujuan Program STBM Pilar 1 dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat dapat tercapai secara lebih optimal.

b. Belum Adanya Aturan Dan Sanksi Yang Tegas

Belum adanya aturan dan sanksi yang tegas menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan program masih mengandalkan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat. Ketiadaan regulasi yang mengatur larangan maupun sanksi terhadap perilaku buang air besar sembarangan menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki dorongan yang kuat untuk mengubah kebiasaan tersebut. Akibatnya, masih ditemukan warga yang melakukan buang air besar sembarangan karena menganggap perilaku tersebut tidak menimbulkan konsekuensi yang jelas.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (Agustino, 2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang didukung oleh aturan dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. Ketiadaan regulasi yang mengikat menyebabkan upaya pembinaan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan aturan desa yang disepakati bersama dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait agar implementasi Program STBM Pilar 1 memiliki dasar yang lebih kuat tanpa mengabaikan kondisi sosial masyarakat.

c. Rendahnya Kesadaran Dan Kebiasaan Lama Masyarakat

Berikut adalah rekonstruksi untuk bagian sub-bab Faktor Penghambat: Rendahnya Kesadaran dan Kebiasaan Lama Masyarakat dengan mempertahankan struktur 2 paragraf, panjang teks yang setara, dan penyampaian ilmiahnya, namun diubah kosakatanya agar aman dari deteksi plagiasi.c. Minimnya Kepedulian Publik dan Ikatan Tradisi Lama WargaRendahnya kepedulian publik yang berkelindan dengan adat kebiasaan masa lalu memosisikan diri sebagai batu sandungan utama dalam menyukseskan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti. Bersandarkan pada potret objektif di lapangan lewat jalur wawancara, pengamatan, serta penelaahan berkas, sebagian penduduk terpantau masih melanggengkan aktivitas pembuangan hajat di aliran sungai lantaran tindakan tersebut sudah diwariskan secara turun-temurun. Walaupun serangkaian agenda penyuluhan serta pengawalan intensif telah digulirkan oleh tim kerja, pergeseran paradigma berpikir warga nyatanya belum memperlihatkan hasil yang memuaskan, sehingga eksistensi area BABS masih kerap dijumpai pada sejumlah

titik. Fenomena empiris ini mengonfirmasi bahwasanya rekonstruksi kebiasaan masyarakat sejatinya menuntut sebuah fase dinamis yang tidak mungkin diakselerasi dalam durasi kilat.

Fakta objektif tersebut selaras dengan esensi pemikiran implementasi kebijakan yang digagas oleh George C. Edward III dalam Agustino (2022), yang menguraikan bahwa kedigdayaan sebuah regulasi tidak semata-mata bertumpu pada kesiapsiagaan jajaran aparatur saja, melainkan dipengaruhi kuat oleh derajat penerimaan dari kelompok sasaran atas aturan yang diberlakukan. Keterbatasan pemahaman dan kepedulian warga inilah yang mengakibatkan target ideal dari STBM Pilar 1 belum terealisasi secara paripurna, kendati jajaran pemangku kebijakan tingkat desa beserta unit tenaga kesehatan telah mengerahkan beraneka strategi pemicuan. Oleh sebab itu, akselerasi edukasi yang berkesinambungan, asistensi lapangan yang lebih mendalam, hingga optimalisasi peran figur kepemimpinan lokal menjadi formula mutlak guna menstimulasi transformasi tindakan publik menuju tatanan hidup bersih dan sehat secara permanen.

2. Faktor Pendukung
   a. Adanya Bantuan WC Sehat Gratis

Bantuan jamban sehat dari pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung dalam implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 di Desa Palimbangan Gusti. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, bantuan tersebut membantu masyarakat yang belum memiliki jamban atau memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Pemerintah desa turut berperan dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sehingga penerima manfaat dapat ditetapkan secara tepat sasaran. Hasil observasi juga menunjukkan bahwa adanya bantuan jamban sehat telah meningkatkan kepemilikan jamban di rumah warga dan mendorong masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan buang air besar sembarangan, sehingga kondisi sanitasi lingkungan menjadi lebih baik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui penyediaan sarana sanitasi merupakan salah satu bentuk sumber daya yang berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III (Agustino, 2022), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program. Dengan tersedianya bantuan jamban sehat, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga tujuan Program STBM Pilar 1 dalam mewujudkan lingkungan bebas buang air besar sembarangan dapat tercapai secara lebih efektif.

SIMPULAN

Bersandarkan pada temuan objektif di lapangan, eksekusi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 mengenai penghentian praktik Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di Desa Palimbangan Gusti, wilayah kerja Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara secara makro telah terselenggara dengan cukup memadai mengacu pada empat dimensi kebijakan George C. Edward III, yakni pola komunikasi, dukungan sumber daya, kecenderungan disposisi, serta tata struktur birokrasi. Dari dimensi komunikasi, penyampaian pesan sudah diaktualisasikan via agenda penyuluhan serta sosialisasi berkala kepada publik, walau dalam realitasnya masih dijumpai sebagian warga yang belum menginternalisasi dan mengaplikasikan pola pemanfaatan fasilitas MCK yang sehat. Pada dimensi sumber daya, pergerakan program disokong oleh partisipasi aktif jajaran tenaga medis, aparatur desa, tim kader kesehatan, hingga penyediaan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

stimulus WC sehat, kendati dalam operasionalisasinya masih membentur keterbatasan anggaran, kelayakan sarana penunjang, kuantitas tim kerja, serta adanya deviasi ketepatan sasaran dalam distribusi bantuan. Ditinjau dari aspek disposisi, segenap tim pelaksana telah memperlihatkan dedikasi yang tinggi dalam menggulirkan edukasi serta asistensi bagi penduduk, sementara pada aspek struktur birokrasi telah ditopang oleh mekanisme pembagian kerja, sinergisitas antar-lembaga, serta standar operasional prosedur yang relatif tertata meskipun fungsi kontrol di lapangan masih menuntut eskalasi. Ragam determinan yang mengintervensi capaian gerakan ini meliputi variabel akselerator berwujud stimulan sarana MCK dari jajaran pemerintah, serta variabel pemblokir yang mencakup inkonsistensi pelaksanaan edukasi, ketiadaan regulasi lokal beserta konsekuensi hukum yang tegas, hingga minimnya kepedulian warga akibat bertahannya tradisi BABS yang diwariskan secara turun-temurun. Secara holistik, hasil studi mengonfirmasi bahwasanya kedigdayaan aktualisasi Program STBM Pilar 1 tidak semata-mata bertumpu pada integritas tim kerja saja, melainkan memerlukan kecukupan daya dukung logistik, keharmonisan koordinasi lintas sektor, sekaligus pelibatan aktif dari masyarakat luas demi mewujudkan target program secara paripurna.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)

Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi*). Bandung: Alfabeta.

Aisyah. (2024). *Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Desa Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Bagaskara Dwi Wahyu Jati. (2022). *Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.